



WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin pesat dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur besaran retribusi penyelenggaraan transportasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5093);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5208);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14 SERI C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
10. Jaringan Transportasi Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
16. Pengujian berkala kendaraan bermotor di air adalah pengujian kendaraan bermotor kapal di bawah 7 GT.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping ;
18. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
20. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
21. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kota.
22. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

23. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
24. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
25. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
26. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
27. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
28. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
29. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
30. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
31. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
32. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal
33. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan
34. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.
35. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
40. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah
42. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
43. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, terdiri atas :

1. Retribusi Terminal.
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
4. Retribusi Penyeberangan di Air

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama :

1. Retribusi Terminal dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan Terminal.
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Khusus.
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
4. Retribusi Penyeberangan di Air dipungut atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (4) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (5) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah terminal, pelayanan tempat khusus parkir, pelayanan jasa kepelabuhanan dan pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan di Terminal.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan di Tempat Khusus Parkir.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa Kepelabuhanan.
- (4) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyeberangan di air.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (4) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyeberangan di air.

**BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA YANG BERSANGKUTAN**

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekwensi, jangka waktu, jenis, tipe yang digunakan.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Jenis Retribusi Terminal, Jenis Tempat Khusus Parkir, Jenis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Jenis Retribusi Penyeberangan di Air adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 9

JENIS RETRIBUSI		BESARNYA TARIF	KETERANGAN
I TERMINAL			
1. Angkutan Umum Yang Masuk Terminal			
a	Angkutan Kota :		
	1. Otolet dan Bus Kecil	Rp. 500,00	Satu kali masuk
	2. Bus Kota	Rp 1.000,00	Satu kali masuk
b	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :		
	1. Bus Kecil	Rp 2.000,00	Satu kali masuk
	2. Bus Sedang	Rp 3.000,00	Satu kali masuk
	3. Bus Besar	Rp 6.000,00	Satu kali masuk
c	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) :		
	1. Bus Kecil	Rp 5.000,00	Satu kali masuk
	2. Bus Sedang	Rp 7.500,00	Satu kali masuk
	3. Bus Besar	Rp10.000,00	Satu kali masuk
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir			
a.	Kendaraan tak Umum		
	1. Bus Sedang/Bus Besar / Truk	Rp 2.500,00	Satu kali masuk/6 jam

		2. Mobil Penumpang/Bus Kecil / Pick Up	Rp 2.000,00	Satu kali masuk/6 jam
		3. Sepeda Motor	Rp 1.000,00	Satu kali masuk/6 jam
	b.	Kendaraan Umum dan tak Umum Yang Menginap	Rp15.000,00	Satu kali masuk/6 jam
3. Retribusi Pelayanan Dan Fasilitas Kamar Mandi Dan Kamar Kecil				
	a	Mandi / Buang air besar	Rp2.000,00	Per Orang
	b	Buang air kecil	Rp1.000,00	Per Orang
4. Retribusi Pelayanan Ruang Tunggu VIP				
			Rp2.000,00	Per Orang/6 jam
5. Retribusi Pemakaian Tempat Dalam Terminal				
	a	Kantor / Loket Kelas A	Rp 75.000,00	Per M ² Per Tahun
	b	Kantor / Loket Kelas B	Rp100.000,00	Per M ² Per Tahun
	c	Kios / Petak	Rp150.000,00	Per M ² Per Tahun
	d	Rumah Makan / Cafeteria	Rp150.000,00	Per M ² Per Tahun
	e	Ruang Terbuka Untuk Kegiatan Komersial	Rp150.000,00	Per M ² Per Tahun
6. Kendaraan Angkutan Barang				
	a	Kendaraan Angkutan Barang yang Masuk Terminal		
		1. Pickup, Kendaraan Roda Tiga	Rp 2.000,00	Sekali masuk
		2. Truk Engkel	Rp 3.000,00	Sekali masuk
		3.Truk/Tangki, Box dan Sejenisnya	Rp 4.000,00	Sekali masuk
		4.Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya	Rp 5.000,00	Sekali masuk
	b	Kendaraan Angkutan Barang yang Bongkar Muat di Terminal		
		1. Pickup, Kendaraan Roda Tiga	Rp 5.000,00	Per I kali Bongkar Muat
		2.Truk Engkel	Rp 10.000,00	Per I kali Bongkar Muat
		3.Truk/Tangki, Box dan Sejenisnya	Rp 15.000,00	Per I kali Bongkar Muat
		4.Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya	Rp 25.000,00	Per I kali Bongkar Muat
	c	Kendaraan Angkutan Barang yang Menginap di Terminal		
		1. Pickup, Kendaraan Roda Tiga	Rp 15.000,00	Per Malam
		2. Truk Engkel	Rp 25.000,00	Per Malam
		3. Truk/Tangki, Box dan Sejenisnya	Rp 35.000,00	Per Malam
		4. Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya	Rp 50.000,00	Per Malam
7. Retribusi Parkir Progresif				
	a.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	2 jam pertama selanjutnya perjam ditambah Rp.500,-

b.	Mobil Penumpang, Station Wagon, Jeep, Sedan dan Pick Up atau sejenisnya	Rp. 2.000,-	2 jam pertama selanjutnya perjam ditambah Rp.1.000,-
c.	Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	2 jam pertama selanjutnya perjam ditambah Rp.1.500,-
d.	Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, Box dan Sejenisnya	Rp. 4.000,-	2 jam pertama selanjutnya perjam ditambah Rp.2.000,-
e.	Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	2 jam pertama selanjutnya perjam ditambah Rp.2.500,-
II. KEPELABUHANAN			
1. Jasa Kepelabuhanan Penyeberangan			
a	Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penjemputan		
	- Dewasa	Rp 2.500,00	per orang sekali masuk
	- Anak	Rp 1.500,00	per orang sekali masuk
b	Pas Masuk Pelabuhan untuk kendaraan		
	Kendaraan Golongan I (Sepeda)	Rp 3.500,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan II (Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	Rp 5.100,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan III (Sepeda moto besar \geq 500 cc dan kendaraan roda 3)	Rp 6.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Penumpang (mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m, dan sejenisnya)	Rp 20.300,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Barang (mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m, dan sejenisnya)	Rp 16.400,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Penumpang (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki ukuran panjang sampai dengan 7 m dan sejenisnya)	Rp 51.500,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Barang (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki ukuran panjang sampai dengan 7 m dan sejenisnya)	Rp 38.400,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Penumpang (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 m s/d 10 m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan)	Rp 77.500,00	per unit sekali masuk

	Kendaraan Golongan VI Barang (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 m s/d 10 m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan)	Rp 58.700,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VII (mobil barang/truck tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 m s/d 12 m dan sejenisnya)	Rp 81.500,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VIII (mobil barang(truck tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 m dan sejenisnya)	Rp 93.700,00	per unit sekali masuk
c	Penggunaan fasilitas der-maga jembatan gerak milik Pemerintah Kota untuk penyeberangan setiap kendaraan :		
	- Kendaraan Golongan II	Rp 5.000,00	
	- Kendaraan Golongan III	Rp 6.000,00	
	- Kendaraan Golongan IV Penumpang	Rp 7.700,00	
	- Kendaraan Golongan IV Barang	Rp 10.500,00	
	- Kendaraan Golongan V Penumpang	Rp 13.000,00	
	- Kendaraan Golongan V Barang	Rp 18.000,00	
	- Kendaraan Golongan VI Penumpang	Rp 17.200,00	
	- Kendaraan Golongan VI Barang	Rp 30.000,00	
	- Kendaraan Golongan VII	Rp 108.000,00	
	- Kendaraan Golongan VIII	Rp 128.500,00	
d	Jasa sandar		
	- Dermaga Beton, jembatan bergerak	Rp 50,00	per GT per Call
	- Dermaga Ponton	Rp 50,00	per GT per Call
	- Kapal Istirahat di dermaga	Rp 40,00	per GT per jam
e	Tarif langganan Pas Masuk Orang/ kendaraan		
	- Karyawan perusahaan di lingkungan pelabuhan	Rp 6.000,00	orang per bulan
	- Kendaraan bermotor Gol IV	Rp 8.000,00	unit per bulan
f	Tarif sewa fasilitas		
	- Pemakaian listrik	PLN+25%	Per KWH
	- Pemakaian Air tawar	PDAM+25%	Per M ³
g	sewa lahan untuk reklame;		

	- Billboard:		
	- ooo. Satu sisi	Rp. 500.000,00	Per meter persegi perbulan
	- ppp. Dua sisi	Rp. 250.000,00	Per meter persegi perbulan
	- Spanduk	Rp. 50.000,00	Per meter persegi perbulan
	- Umbul-umbul	Rp. 20.000,00	Per meter persegi perbulan
	- Spot Counter Promotion/ Stand Promotion	Rp. 20.000,00	Per meter persegi perbulan
	- Neon Box	Rp. 20.000,00	Per meter persegi perbulan
	- Sign Ad/ Rambu-rambu	Rp. 20.000,00	Per meter persegi perbulan
	- Working Promotion	Rp. 20.000,00	per orang sekali masuk
h	Retribusi Pemakaian Gedung Pelabuhan		
	-Usaha	Rp 75.000,00	Permeter persegi pertahun
	-Kantor	Rp. 100.000,00	Permeter persegi per tahun
	-Rumah Makan/Cafetaria	Rp. 150.000,00	Permeter persegi per tahun
	-Ruang Tunggu penumpang VIP	Rp. 150.000,00	Per sekali pakai
	-Gedung penumpang untuk hajatan	Rp.1.500.000,00	Per sekali pakai
i	Retribusi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil		
	- mandi/ buang air besar	Rp 2.000,00	per orang sekali masuk
	- buang air kecil	Rp 1.000,00	per orang sekali masuk
2. Jasa Kepelabuhanan Sungai dan Danau			
a	Retribusi Tambat/ Labuh Kapal setiap Dermaga		
	- Tongkang Besi/ gandeng	Rp 15.000,00	Sekali Tambat
	- Jukung, gandeng, tongkang kayu	Rp 10.000,00	Sekali Tambat
	- Ketek barang	Rp 2.000,00	Sekali Tambat
	- Ketek penumpang	Rp 1.500,00	Sekali Tambat
	- Speed boat < 85 PK	Rp 5.000,00	Sekali Tambat
	- Speed Boat 85 > < 200PK	Rp 10.000,00	Sekali Tambat
	- Speed Boat > 200 PK	Rp 20.000,00	Sekali Tambat
	- Kapal < 20 GT	Rp 20.000,00	Sekali Tambat
	- Kapal 20 > < 50 GT	Rp 25.000,00	Sekali Tambat
	- Kapal 50 > < 100 GT	Rp 30.000,00	Sekali Tambat
	- Kapal >100GT	Rp 75.000,00	Sekali Tambat
b	Retribusi Pemakaian ruangan dalam Pelabuhan Sungai		
	- Usaha	Rp 75.000,00	Per M ² Per Tahun
	- Kantor	Rp 100.000,00	Per M ² Per Tahun
	- Kios/ Petak	Rp 150.000,00	Per M ² Per Tahun
	- Rumah Makan/ Cafetaria / Warung	Rp 150.000,00	Per M ² Per Tahun
c	Retribusi pemakaian lahan / tanah pelabuhan		
	- Usaha	Rp. 50.000,00	Per meter persegi per tahun
	- Kantor	Rp. 75.000,00	Per meter persegi per tahun

d	Sewa lahan untuk reklame		
	- ooo. Satu sisi	Rp. 500.000,00	Per meter persegi per bulan
	- ppp. Dua sisi	Rp. 250.000,00	Per meter persegi per bulan
	- Spanduk	Rp. 50.000,00	Per meter persegi per bulan
	- Umbul-umbul	Rp. 20.000,00	Per meter persegi per bulan
	- Spot Counter Promotio/ Stand Promotion	Rp. 20.000,00	Per meter persegi per bulan
	- Neon Box	Rp. 20.000,00	Per meter persegi per bulan
	- Sign Ad/Rambu-rambu	Rp. 20.000,00	Per meter persegi per bulan
	- Working Promotion	Rp. 20.000,00	Per meter persegi per bulan
	e	Retribusi Bongkar Muat Barang & Hewan di dermaga	Rp1.000,00
f	Retribusi Pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan		
	- Kendaraan Roda 2	Rp1.000,00	per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 3	Rp2.000,00	per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 4	Rp3.000,00	per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda >6	Rp5.000,00	per unit sekali masuk
3. Retribusi Sewa Perairan Pelabuhan			
a	- Rumah rakit untuk rumah makan	Rp1.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau Boat	Rp1.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Rumah makan kontruksi ponton	Rp2.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Galangan/ Bengkel Apung/ Perawatan Kapal	Rp2.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Kios Terapung	Rp2.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- SPBB	Rp2.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Keramba ikan	Rp 500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Log pond	Rp2.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Kolam galangan kapal	Rp1.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Gardu pompa air/pipa air	Rp1.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Rumah tempat usaha	Rp1.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	b	Pelabuhan khusus/ terminal khusus	
- Ukuran <200 m2		Rp1.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
- Ukuran 201 m2 s/d 300 m2		Rp2.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Ukuran > 300m2	Rp2.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
c	Retribusi Bongkar Muat Barang & Hewan di dermaga	Rp 1.000,00	Per ton per M ² per hari

4. Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di air				
a	Sewa Kapal Kerja (diluar biaya operasi/ BBM)			
	- Kapal Sigentar Alam	Rp200.000,00		Per Jam
	- Kapal DB.02	Rp250.000,00		Per Jam
	- Seed Boat 230 PK	Rp 75.000,00		Per Jam
	- Seed Boat 85 PK	Rp 75.000,00		Per Jam
b	Tarif Angkutan Bus Air	Rp 5.000,00		Per Penumpang

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efektif dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang membidangi pelayanan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

Pasal 17

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

Bagian Ketujuh Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh
Pembukuan dan Pemeriksaan
Pasal 28**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 1)
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 30)
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10).

beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

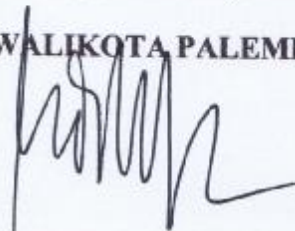
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H/ EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-8-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husein Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI C